

# **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

## **PORTOFOLIO**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

### **Dosen Pengampu:**

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



### **Disusun Oleh :**

#### **Kelompok 5**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Icha Fera Nika     | 2313031065 |
| 2. Lusi Yana Agustina | 2313031069 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## ANALISIS ARTIKEL 1

### A. IDENTITAS ARTIKEL

Judul artikel : Penguatan Transparansi dalam Mendukung Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Layanan Publik

Publikasi : Ombudsman Republik Indonesia

Tahun : 2024

Penulis : Florencia Kezia Nuhan, Kartika Purwaningtyas

Website : <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan-transparansi-dalam-mendukung-reformasi-birokrasi-pada-penyelenggaraan-layanan-publik>

### B. DESKRIPSI ARTIKEL

Artikel ini berisi analisis mengenai pentingnya transparansi sebagai fondasi reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Ditulis oleh Ombudsman RI, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman bagi birokrat, pembuat kebijakan, dan masyarakat tentang bagaimana keterbukaan informasi dapat memperkuat akuntabilitas dan membangun birokrasi yang bersih, profesional, serta melayani publik dengan optimal.

#### **Analisis Artikel**

Artikel ini menekankan bahwa praktik maladministrasi termasuk penundaan layanan, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan perilaku tidak etis menjadi hambatan utama bagi tercapainya birokrasi yang efektif dan akuntabel. Penulis menggarisbawahi bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi strategis untuk mencegah praktik-praktik maladministrasi tersebut. Dengan keterbukaan informasi mengenai proses layanan publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi, memberikan masukan, dan mengevaluasi kinerja birokrat secara aktif. Data dari Ombudsman (2023) menunjukkan bahwa penguatan transparansi berkontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, artikel ini menekankan peran partisipasi publik sebagai kontrol sosial yang memperkuat reformasi birokrasi: keterlibatan masyarakat memastikan bahwa perubahan tidak hanya bersifat top-down, tetapi berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini menggambarkan transparansi sebagai pilar utama untuk membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani kepentingan publik secara nyata.

## **Kesimpulan**

Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan transparansi merupakan prasyarat utama dalam reformasi birokrasi Indonesia. Keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada perbaikan prosedur internal, tetapi juga pada keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat. Partisipasi publik menjadi elemen kunci untuk memastikan birokrasi tetap akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan membudayakan transparansi dan melibatkan masyarakat secara nyata, birokrasi Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang bersih, responsif, dan benar-benar melayani kepentingan publik. Reformasi birokrasi yang efektif, oleh karena itu, memerlukan kombinasi strategi struktural, budaya organisasi yang transparan, dan kontrol sosial aktif agar perubahan dapat berkelanjutan.

## ANALISIS ARTIKEL 2

### A. IDENTITAS ARTIKEL

Judul artikel : Masa Depan Akuntansi Sektor Publik Syariah di Indonesia: Peluang Dan Tantangan

Publikasi : Kompasiana

Tahun : 2024

Penulis : Agus Arwani

Website

<https://www.kompasiana.com/agusarwani2024/66b1d30ac925c428aa6fc105/masa-depan-akuntansi-sektor-publik-syariah-di-indonesia-tantangan-dan-peluang>

### B. DESKRIPSI ARTIKEL

Artikel ini membahas perkembangan dan prospek akuntansi sektor publik berbasis prinsip syariah di Indonesia. Ditulis untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik, sekaligus menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya reformasi sektor publik berbasis syariah. Artikel ini relevan untuk akademisi, mahasiswa, praktisi akuntansi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami implementasi akuntansi syariah di tingkat publik.

#### Analisis Artikel

Artikel ini menekankan bahwa Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan akuntansi sektor publik berbasis prinsip syariah. Penerapan akuntansi syariah di sektor publik tidak hanya bertujuan memenuhi aspek religius, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Penulis mengidentifikasi sejumlah tantangan yang signifikan. Rendahnya pemahaman mengenai akuntansi syariah di kalangan aparatur pemerintah, keterbatasan infrastruktur, serta belum adanya regulasi yang menyeluruh menjadi hambatan utama. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan sistem akuntansi konvensional dan belum siap beralih ke sistem syariah, sehingga diperlukan edukasi, pelatihan, dan pengembangan sistem yang memadai agar transisi dapat berjalan lancar.

Di sisi lain, artikel ini menyoroti peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah yang semakin meningkat, kesadaran

masyarakat terhadap prinsip syariah, serta potensi kerja sama internasional menjadi modal penting dalam pengembangan akuntansi sektor publik syariah. Indonesia memiliki kesempatan menjadi pionir di tingkat global, tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga sebagai contoh bagi negara-negara Muslim lainnya. Penulis juga menekankan peran akademisi dan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan kurikulum akuntansi syariah untuk menghasilkan generasi yang kompeten dalam pengelolaan keuangan publik berbasis prinsip syariah.

### **Kesimpulan**

Penerapan akuntansi sektor publik berbasis syariah di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan jika dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif. Tantangan seperti keterbatasan pemahaman, infrastruktur, dan regulasi dapat diatasi melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan kebijakan pemerintah. Keberhasilan implementasi tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pionir akuntansi publik syariah di tingkat global, sekaligus memperkuat ekonomi syariah nasional.

## ANALISIS ARTIKEL 3

### A. IDENTITAS ARTIKEL

Judul artikel : *Digital Governance* yang Partisipatif: Peran Publik, Kepemimpinan Digital, dan Pengawasan Pelayanan Publik

Publikasi : Ombudsman Republik Indonesia

Tahun : 2025

Penulis : Patnuaji Agus Indarto

Website

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--digital-governance-yang-partisipatif-peran-publik-kepemimpinan-digital-dan-pengawasan-pelayanan-publik>

### B. DESKRIPSI ARTIKEL

Artikel ini membahas konsep digital governance dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, dengan fokus pada pentingnya partisipasi masyarakat, kepemimpinan digital birokrasi, dan pengawasan pelayanan publik melalui platform digital. Artikel menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pemerintahan agar layanan publik menjadi lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

#### Analisis Artikel

Artikel menjelaskan bahwa digital governance merupakan paradigma tata kelola pemerintahan yang menempatkan warga negara sebagai peserta aktif dalam layanan publik. Teknologi informasi membuka ruang partisipasi, memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran secara langsung melalui platform digital. Ombudsman RI berperan penting dalam memastikan pengaduan warga diproses dengan cepat dan adil, sekaligus menganalisis data pengaduan untuk mengidentifikasi maladministrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Kepemimpinan digital birokrasi juga menjadi sorotan, di mana pejabat publik harus mampu mengintegrasikan data dan teknologi untuk menciptakan sistem pelayanan berbasis bukti dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Artikel ini menyoroti tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, literasi digital yang belum merata, dan resistensi budaya birokrasi. Tanpa komitmen politik dan pembangunan kapasitas kelembagaan,

digital governance berisiko menimbulkan eksklusi digital, bukan pemerintahan yang inklusif.

### **Kesimpulan**

Digital *governance* harus dipahami sebagai transformasi yang menggabungkan teknologi, partisipasi publik, dan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan melayani masyarakat. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kepemimpinan birokrasi yang visioner, sistem pengawasan yang efektif, literasi digital masyarakat yang memadai, serta mekanisme pengaduan yang responsif. Dengan kombinasi elemen-elemen tersebut, birokrasi dapat menjadi lebih adaptif, efisien, dan benar-benar melayani rakyat.

## ANALISIS JURNAL NASIONAL 1

### A. IDENTITAS JURNAL

Judul jurnal : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya untuk  
Penilaian Akuntabilitas serta Kinerja Pemerintah Daerah  
Nama penulis : Fadilatul Jannah, Yedida Cahya A. P.  
Tahun terbit : 2022  
ISSN : 2827-7694  
Jurnal : JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA

### B. DESKRIPSI JURNAL

#### Pendahuluan

Pelaporan keuangan pada sektor publik berfungsi sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran negara dan daerah. Penyusunan laporan ini mendukung prinsip good governance dengan menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, auditor, lembaga legislatif, dan pihak lain yang membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas publik. Proses penyajian laporan keuangan membutuhkan peran akuntan sektor publik, mulai dari pengumpulan hingga penyampaian informasi keuangan. Dalam jurnal ini, penulis juga menyoroti kasus PT Cipta Daya Nusantara Manado tahun 2010–2012 yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat likuiditas relatif stabil, adanya masalah dalam manajemen kas dan menurunnya profitabilitas dapat memicu kerentanan terhadap kebangkrutan.

#### Metode

Penelitian menerapkan metode studi kasus dan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi keuangan sektor publik melalui interpretasi data laporan keuangan. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan.

#### Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan sektor publik merupakan dokumen yang mencatat transaksi dan posisi keuangan suatu entitas pemerintahan. Selain sebagai sarana pertanggungjawaban, laporan



ini juga digunakan untuk mengukur kinerja, menyediakan data sebagai dasar keputusan, dan memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan terkait posisi keuangan, kinerja, serta aliran kas bagi berbagai pemangku kepentingan, baik masyarakat, investor, kreditor, hingga aparatur pemerintah sendiri. Jurnal ini menekankan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan baik mampu:

- meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik,
- memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja pemerintah daerah,
- mendukung proses perencanaan dan evaluasi,
- serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

### **Kesimpulan**

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas sektor publik dan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Informasi yang terdapat di dalamnya bermanfaat bagi internal organisasi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian, sementara bagi pihak eksternal berperan sebagai dasar pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik mendukung transparansi dan membantu meningkatkan kualitas laporan serta pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan.

### **C. DAFTAR PUSTAKA**

Putri, Y. C. A. P., & Jannah, F. (2022). Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya untuk Penilaian Akuntabilitas serta Kinerja Pemerintah Daerah. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(1), 26–33.

## ANALISIS JURNAL NASIONAL 2

### A. IDENTITAS JURNAL

Judul jurnal : Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia  
Nama penulis : Harumi Puspa & Doddy Setiawan  
Tahun terbit : 2019  
ISSN (Print) : 2302-6251  
ISSN (Online) : 2477-4995  
Jurnal : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan

### B. DESKRIPSI JURNAL

#### Pendahuluan

Jurnal ini membahas perkembangan penelitian akuntansi sektor publik yang mengalami perubahan signifikan dari sistem tradisional menuju paradigma *New Public Management* (NPM). Perubahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap penelitian akuntansi sektor publik semakin meningkat di Indonesia, yang terlihat dari bertambahnya jurnal pada jurnal terakreditasi nasional. Penulis menegaskan bahwa riset terkait akuntansi sektor publik tidak hanya berkembang di dalam negeri tetapi juga menjadi perhatian di berbagai negara.

#### Metode

Penelitian menggunakan metode “*charting the field*”, yaitu teknik pemetaan penelitian berdasarkan topik dan metode penelitian. Pendekatan ini mengikuti model yang dikembangkan *Hesford et al.* (2007).

Jurnal yang dianalisis merupakan publikasi dari 22 jurnal terakreditasi SINTA 2 hingga Maret 2019 yang relevan dengan kata kunci akuntansi dan bisnis. Peneliti mengidentifikasi tema penelitian dan metode yang digunakan untuk melihat kecenderungan perkembangan riset dalam periode tertentu.

#### Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji 137 jurnal mengenai akuntansi sektor publik yang dipublikasikan antara tahun 2010–2018 pada 22 jurnal terakreditasi. Jurnal yang memuat artikel paling banyak adalah Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). Topik dominan

dalam penelitian akuntansi sektor publik meliputi pengungkapan laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan flypaper effect. Sementara itu, topik seperti sistem akuntansi sektor publik dan perpajakan masih jarang diteliti. Dari segi metode, penelitian kuantitatif mendominasi dengan persentase 70%, sedangkan metode kualitatif menyumbang 28%. Metode penelitian yang paling sering digunakan adalah survei (34%) dan archival (32%). Penelitian eksperimental sangat jarang ditemukan, sehingga menjadi peluang yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

### **Kesimpulan**

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa meskipun penelitian akuntansi sektor publik meningkat, masih terdapat banyak tema yang belum dieksplorasi secara mendalam. Topik-topik yang kurang mendapat perhatian dapat menjadi potensi penelitian yang menarik untuk dikembangkan. Penulis menekankan pentingnya variasi metode penelitian, terutama metode eksperimen yang masih sangat terbatas penggunaannya.

### **C. DAFTAR PUSTAKA**

Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 8(2), 94–116.

## ANALISIS JURNAL NASIONAL 3

### A. IDENTITAS JURNAL

Judul jurnal	: Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan
Nama penulis	: Putri Ariella Belinda, Nevi Costari
Tahun terbit	: 2011
ISSN	: 2827-7694
Jurnal	: JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA

### B. DESKRIPSI JURNAL

#### Pendahuluan

Jurnal ini membahas urgensi penerapan sistem akuntansi sektor publik dalam instansi pemerintah sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penulis menekankan bahwa dengan semakin kompleksnya pengelolaan dana publik, maka kebutuhan akan mekanisme akuntansi yang tepat menjadi semakin mendesak. Hal ini terkait dengan tuntutan publik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana serta efektivitas layanan yang disediakan oleh pemerintah.

#### Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif analitis dengan memanfaatkan data sekunder dan studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi sektor publik dan dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintahan. Analisis menyajikan temuan berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian empiris yang relevan di Indonesia.

#### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan akuntansi sektor publik dengan baik mampu:

1. menyediakan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya;
2. meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik;
3. mendorong partisipasi publik dan memfasilitasi akuntabilitas melalui keterbukaan informasi.

Namun, penelitian juga menemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang akuntansi sektor publik, regulasi yang sering berubah, serta teknologi informasi yang belum optimal mendukung pelaporan keuangan. Penulis menyoroti bahwa meskipun akuntansi sektor publik telah menjadi perhatian, banyak instansi yang belum melaksanakan dengan optimal.

### **Kesimpulan**

Penerapan akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Instansi pemerintah yang menjalankan sistem tersebut secara benar akan memperoleh manfaat signifikan dalam hal pelaporan, pengendalian internal, dan kepercayaan publik. Namun demikian, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan regulasi, kompetensi SDM, dan dukungan teknologi.

Dijelaskan pula bahwa akuntansi sektor publik dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban dengan lebih terstruktur, sehingga kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dengan jelas. Jurnal ini menyarankan agar instansi memperkuat kapasitas akuntansi, memperjelas regulasi, dan meningkatkan infrastruktur TI agar implementasi akuntansi sektor publik dapat maksimal.

### **C. DAFTAR PUSTAKA**

Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 1(1), 58–77.

## ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

### A. IDENTITAS JURNAL

Judul jurnal	: <i>Bridging Between Financial Performance and Government Performance: The Role of Publik Sector Accounting in Realizing Good Governance</i>
Nama penulis	: Wahyu Setyawan
Tahun terbit	: 2025
Nama jurnal	: <i>Journal of Management Economics and Accounting</i>
Vol dan halaman	: Vol. 2 No. 2
ISSN jurnal	: 3047-602X

### B. DESKRIPSI JURNAL

#### Tujuan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana akuntansi sektor publik berperan sebagai “jembatan” antara kinerja keuangan dan kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini ingin menyoroti sejauh mana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, mekanisme audit, pemanfaatan teknologi, serta integrasi prinsip keberlanjutan termasuk SDGs dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, penelitian bertujuan menilai berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi akuntansi sektor publik serta menawarkan solusi berdasarkan temuan-literatur untuk mendorong praktik akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan negara.

#### Hasil Penelitian

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan dampak besar dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akrual memungkinkan pemerintah mencatat aset, kewajiban, dan arus keuangan secara lebih lengkap sehingga informasi fiskal menjadi lebih akurat dan relevan. Temuan dari berbagai penelitian yang dianalisis juga memperlihatkan bahwa sistem akrual membantu lembaga pengawas seperti BPK dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan, meningkatkan efektivitas audit, dan memperkecil peluang korupsi. Namun demikian, penelitian juga menemukan berbagai tantangan signifikan, seperti keterbatasan

SDM, kurangnya pelatihan teknis, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Hasil lainnya menegaskan bahwa akuntansi sektor publik bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas keputusan pemerintah melalui data yang lebih valid, terutama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Integrasi indikator SDGs dalam pelaporan keuangan terbukti mampu memperbaiki arah kebijakan dan prioritas anggaran, meskipun implementasinya masih terhambat oleh ketimpangan data, kurangnya pemahaman konsep keberlanjutan, serta belum harmonisnya regulasi nasional dengan standar internasional.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan sistem akrual membuat laporan keuangan lebih akurat, transparan, dan mudah dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Audit independen serta pengawasan berbasis teknologi memperkuat integritas laporan keuangan dan membantu mencegah korupsi. Dengan demikian, akuntansi sektor publik menjadi bukan hanya alat administratif, tetapi juga mekanisme strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan membangun kepercayaan publik.

Selain itu, integrasi prinsip keberlanjutan dan SDGs dalam pelaporan keuangan pemerintah dianggap sangat penting untuk mendukung pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan SDM, kurangnya standar pelaporan yang seragam, dan keterbatasan teknologi, solusi yang ditawarkan meliputi penguatan pelatihan, harmonisasi kebijakan, modernisasi sistem informasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, akuntansi sektor publik diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **C. DAFTAR PUSTAKA**

Setyawan, W. (2025). Bridging Between Financial Performance and Government Performance: The Role of Public Sector Accounting in Realizing Good Governance. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 2(2), 1–15.

<https://jurnalhafasy.com/index.php/oikonomia/article/view/291/411>

## ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

### A. IDENTITAS JURNAL

Judul jurnal	: <i>The Effect of Public Sector Accounting Implementation to Prevent Fraud In The Public Sector in The Digital Era at PT. PLN UP3 Binjai</i>
Nama penulis	: Berupilihen Br Ginting, Amin Hou, Dewi Rafiah Pakpahan, Sabarudddin Chaniago, Nabila Diska Amanda.
Tahun terbit	: 2023
Nama jurnal	: <i>Journal Management</i>
Vol dan halaman	: Vol. 14 No. 6
ISSN jurnal	: 2086-7654

### B. DESKRIPSI JURNAL

#### Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dalam mencegah terjadinya fraud atau kecurangan pada sektor publik, khususnya di PT PLN UP3 Binjai pada era digital. Peneliti ingin memahami bagaimana sistem akuntansi sektor publik dapat digunakan sebagai perangkat pencegahan, terutama dalam mengurangi kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi yang sering menjadi pemicu fraud sebagaimana dijelaskan dalam teori *Fraud Triangle*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menggali bagaimana akuntansi sektor publik yang dikombinasikan dengan internal control serta pemanfaatan teknologi digital mampu memperkuat sistem pengawasan dan meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan data, manipulasi anggaran, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin memperoleh gambaran mendalam dari perspektif organisasi, khususnya melalui wawancara dengan Satuan Pengawas Internal (SPI), terkait upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk mencegah fraud di lingkungan PT PLN UP3 Binjai.

#### Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud di sektor publik, terutama dalam era digital, sering terjadi karena penyalahgunaan teknologi, kurangnya pemahaman pegawai terhadap penggunaan sistem digital, serta adanya peluang yang muncul dari lemahnya pengendalian internal. Berdasarkan wawancara dengan Satuan Pengawas Internal,



ditemukan bahwa bentuk-bentuk fraud yang muncul meliputi manipulasi data, memanfaatkan celah sistem digital untuk keuntungan pribadi, serta memanfaatkan kesalahan manusia (*human error*) yang terjadi akibat keterbatasan literasi digital pegawai. Penelitian juga menegaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran signifikan dalam mencegah *fraud* jika dijalankan secara konsisten melalui tujuh elemen utama, yaitu perencanaan publik, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit sektor publik, dan akuntabilitas publik. Ketujuh elemen ini, apabila diterapkan dengan baik dan terintegrasi dengan teknologi digital, mampu memberikan transparansi yang lebih tinggi, mempersempit ruang manipulasi, dan mempercepat deteksi bila terjadi penyimpangan.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa fraud di PT PLN UP3 Binjai dapat diminimalisasi melalui kombinasi strategi teknis, strategi paradigma ganda, dan strategi preventif. Strategi teknis dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti sistem pelaporan cepat, pemantauan akses data secara real time, dan penggunaan perangkat keamanan digital yang dikendalikan oleh petugas keamanan data (*privacy officer*). Strategi paradigma ganda lebih menekankan pada pembentukan budaya anti-fraud dan memperkuat integritas pegawai melalui pengawasan dan sosialisasi etika kerja. Sedangkan strategi preventif mencakup penggunaan algoritma, data mining, dan sistem deteksi dini untuk mengenali pola fraud. Hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik, didukung oleh pengawasan internal yang kuat dan teknologi digital yang tepat, secara nyata mampu menekan peluang terjadinya fraud dalam operasional PT PLN UP3 Binjai.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik fraud di sektor publik pada era digital umumnya dipicu oleh pemanfaatan teknologi digital secara tidak tepat, baik karena kesengajaan maupun kurangnya kemampuan dan pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem digital. Fraud muncul ketika teknologi memberikan celah baru yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi data, menutupi penyimpangan, atau mengambil keuntungan pribadi dari kelemahan sistem informasi. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya sekadar sistem pencatatan, tetapi menjadi instrumen penting yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan di lingkungan instansi publik.

Lebih lanjut, kesimpulan menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik mampu mencegah *fraud* di PT PLN UP3 Binjai apabila diterapkan dengan mempertimbangkan

faktor-faktor yang mempengaruhi fraud seperti akuntabilitas kinerja, integritas sistem, dan kualitas pengendalian internal. Upaya pencegahan harus disertai penerapan strategi teknis berbasis digital, pendekatan paradigma ganda yang menekankan budaya anti-fraud, serta strategi preventif yang memanfaatkan teknologi analitik dan sistem deteksi dini. Dengan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan literasi digital, dan konsistensi penerapan akuntansi sektor publik, institusi dapat memperkecil peluang terjadinya fraud dan meningkatkan kualitas tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel.

### C. DAFTAR PUSTAKA

Ginting, B. B., Hou, A., Pakpahan, D. R., Chaniago, S., & Amanda, N. D. (2023). The Effect of Public Sector Accounting Implementation to Prevent Fraud in the Public Sector in the Digital Era at PT. PLN UP3 Binjai. *ProBisnis : Jurnal Manajemen*, 14(6), 701–707.

<https://ejournal.joninstitute.org/index.php/ProBisnis/article/view/418/340>

# ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

## A. Laporan Realisasi APBN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN REALISASI APBN**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 (Audited)			TA 2022 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.2.1</b>				
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	<b>B.2.1.1</b>	<b>2.118.348.000.000.000</b>	<b>2.154.208.219.467.830</b>	<b>101,69%</b>	<b>2.034.552.436.470.075</b>
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	2.045.450.000.000.000	2.089.718.285.003.417	102,16%	1.943.654.770.952.334
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	72.898.000.000.000	64.489.934.464.413	88,47%	90.897.665.517.741
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>B.2.1.2</b>	<b>515.800.881.485.000</b>	<b>612.537.298.582.643</b>	<b>118,75%</b>	<b>595.594.554.180.605</b>
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	223.312.141.813.000	254.203.031.073.614	113,83%	268.770.896.270.784
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	81.535.797.918.000	82.058.743.373.870	100,64%	40.597.091.946.149
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.3	79.459.372.890.000	95.860.392.158.963	120,64%	89.902.312.175.594
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.4	131.493.568.864.000	180.415.131.976.196	137,20%	196.324.253.788.078
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	<b>B.2.1.3</b>	<b>3.100.000.000.000</b>	<b>17.184.158.879.725</b>	<b>554,33%</b>	<b>5.696.055.413.792</b>
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>		<b>2.637.248.881.485.000</b>	<b>2.783.929.676.930.198</b>	<b>105,56%</b>	<b>2.635.843.046.064.472</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2.2</b>				
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>B.2.2.1</b>	<b>2.302.457.850.414.000</b>	<b>2.239.786.701.499.164</b>	<b>97,28%</b>	<b>2.280.027.893.034.978</b>
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	442.507.211.693.000	412.711.324.466.564	93,27%	402.441.656.300.334
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	375.881.911.438.000	432.714.969.865.127	115,12%	426.149.081.519.090
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	210.322.961.353.000	303.041.293.068.751	144,08%	240.570.302.124.070
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	441.400.000.000.000	439.882.584.341.259	99,66%	386.341.819.789.815
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	298.497.119.385.000	269.592.086.053.747	90,32%	252.812.907.867.326
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	10.085.840.000	219.140.718.777	2172,76%	5.803.272.496.643
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	148.516.872.686.000	156.601.633.832.214	105,44%	161.523.078.405.990
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	385.321.688.019.000	225.023.669.152.725	58,40%	404.385.774.531.710
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	<b>B.2.2.2</b>	<b>814.718.494.042.000</b>	<b>881.430.544.208.454</b>	<b>108,19%</b>	<b>816.234.826.067.696</b>
1. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	136.259.972.888.000	205.666.564.020.630	150,94%	168.414.110.278.434
2. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.2	396.000.000.000.000	398.029.628.594.542	100,51%	378.000.000.000.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN REALISASI APBN**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 (Audited)			TA 2022 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
3. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.3	185.797.257.584.000	181.357.561.783.241	97,61%	173.164.641.054.831
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.3.1	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	94,22%	54.783.954.054.112
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.3.2	130.297.270.000.000	128.081.946.376.309	98,30%	118.380.687.000.719
c. Hibah kepada Daerah	B.2.2.2.3.3	2.077.523.749.000	2.940.874.059.627	141,56%	
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.4	17.241.263.570.000	17.241.263.570.000	100,00%	20.436.263.570.000
5. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.5	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	96,67%	1.320.000.000.000
6. Dana Desa	B.2.2.2.6	70.000.000.000.000	69.856.768.617.317	99,80%	67.906.138.390.431
7. Insentif Fiskal	B.2.2.2.7	8.000.000.000.000	7.906.031.813.500	98,83%	6.993.672.774.000
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>		<b>3.117.176.344.456.000</b>	<b>3.121.217.245.707.618</b>	<b>100,13%</b>	<b>3.096.262.719.102.674</b>
<b>C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)</b>	<b>B.2.3</b>	<b>(479.927.462.971.000)</b>	<b>(337.287.568.777.420)</b>	<b>70,28%</b>	<b>(460.419.673.038.202)</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	<b>B.2.4</b>				
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)</b>	<b>B.2.4.1</b>	<b>498.362.712.804.000</b>	<b>277.369.700.819.453</b>	<b>55,66%</b>	<b>563.782.350.533.612</b>
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	229.105.371.913.000	37.225.200.000.000	16,25%	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	6.349.993.814.000	6.374.398.495.969	100,38%	3.952.157.097.370
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	609.660.828.000	1.097.737.606.166	180,06%	667.176.265.512
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	437.834.050.997.000	308.193.788.405.962	70,39%	658.816.905.421.376
Penerimaan Surat Berharga Negara			848.108.055.742.428		1.097.456.235.269.295
Pengeluaran Surat Berharga Negara			539.914.267.336.466		438.639.329.847.919
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	749.450.378.000	14.558.368.405.525	1942,54%	8.201.282.354.241
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.481.576.753.000	17.504.129.527.679	502,76%	10.125.528.103.890
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		2.732.126.375.000	2.945.761.122.154	107,82%	1.924.245.749.649
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(155.955.303.621.000)	(69.897.795.440.654)	44,82%	(86.724.307.604.887)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(330.511.505.000)	(330.511.505.000)	100,00%	(1.130.863.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)	100,00%	(20.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9		148.514.851.485		

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN REALISASI APBN**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 (Audited)			TA 2022 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)</b>	<b>B.2.4.2</b>	<b>(18.435.249.833.000)</b>	<b>79.294.046.895.068</b>	<b>(430,12%)</b>	<b>27.195.789.556.541</b>
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	62.056.062.121.000	162.650.352.798.218	262,10%	108.283.083.586.601
a. Penarikan Pinjaman Program/Tunai	B.2.4.2.1.1	29.500.000.000.000	82.990.780.840.684	281,32%	65.592.711.439.666
b. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	B.2.4.2.1.2	32.556.062.121.000	79.659.571.957.534	244,68%	42.690.372.146.935
2. Pemberian Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(1.065.247.517.000)	(1.905.999.112.657)	178,93%	(1.805.388.784.603)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(79.426.064.437.000)	(81.450.306.790.493)	102,55%	(79.281.905.245.457)
Jumlah Pembiayaan (D.J + D.II)		<b>479.927.462.971.000</b>	<b>356.663.747.714.521</b>	<b>74,32%</b>	<b>590.978.140.090.153</b>
<b>E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D + C)</b>	<b>B.2.5</b>		<b>19.376.178.937.101</b>		<b>130.558.467.051.951</b>

Jakarta, 21 Mei 2024  
a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Sri Mulyani Indrawati

## B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>A. Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>C.1</b>	<b>478.957.156.319.401</b>	<b>337.779.006.818.346</b>
<b>B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<b>C.2</b>	<b>(35.000.000.000.000)</b>	<b>-</b>
<b>C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>	<b>C.3</b>	<b>19.376.178.937.101</b>	<b>130.558.467.051.951</b>
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		<b>463.333.335.256.502</b>	<b>468.337.473.870.297</b>
<b>D. Penyesuaian SAL</b>			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(3.548.034.701.030)	11.648.084.260.735
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	(287.428.484.774)	(1.028.401.811.631)
Total Penyesuaian SAL		<b>(3.835.463.185.804)</b>	<b>10.619.682.449.104</b>
<b>E. Saldo Anggaran Lebih Akhir (A + B + C + D)</b>	<b>C.6</b>	<b>459.497.872.070.698</b>	<b>478.957.156.319.401</b>

Jakarta, 21 Mei 2024  
a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Sri Mulyani Indrawati

## C. Laporan Neraca

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
<b>ASET</b>	<b>D.2.1</b>		
<b>Aset Lancar</b>	<b>D.2.1.1</b>		
Kas dan Setor Kas	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	3.507.746.690.531	5.451.617.307.850
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	5.128.787.424.755	2.774.967.342.454
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	4.930.655.723	799.340.452
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	167.710.858.794	215.527.152.362
Kas di Bendahara Penarikan	D.2.1.1.1.6	318.602.129.457	28.613.691.119
Kas Lainnya dan Setor Kas	D.2.1.1.1.7	21.596.978.800.469	53.332.149.928.820
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	57.124.640.158.483	52.624.849.776.050
<b>Jumlah Kas dan Setor Kas</b>		<b>430.715.095.759.788</b>	<b>460.525.416.110.350</b>
Utang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	44.479.546.335	20.878.963.110
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	35.230.294.868.007	26.341.869.598.933
Belanja Dibayar Dimuka dan Utang Muka Belanja	D.2.1.1.4	29.180.110.096.058	50.582.083.648.060
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	15.268.713.521.615	17.502.805.658.048
Piutang	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	117.416.962.637.090	114.374.519.793.781
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	346.336.409.911.621	323.802.977.991.480
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	6.303.880.875	5.581.199.227
Bagian Lancar Tagihan Turunan	D.2.1.1.6.4	51.329.653.281	165.927.835.826
Perbendaharaan/Turunan Garansi Rugi (TPYGR)	D.2.1.1.6.5	20.910.716.096.280	23.717.712.129.347
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.6	7.658.889.809.661	7.851.145.991.883
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.7	5.666.487.830.436	4.855.272.384.332
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.8	109.652.841	22.305.766
Jumlah Piutang (Bruto)		498.047.305.871.088	474.773.559.328.622
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(218.262.010.449.930)	(324.433.224.802.061)
Jumlah Piutang (Bersih)		179.785.295.421.158	150.340.334.526.561
Pemasakan	D.2.1.1.7	204.183.149.868.940	190.034.054.918.418
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>894.467.139.681.901</b>	<b>895.467.443.423.480</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>D.2.1.2</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	19.553.196.920.303	18.311.462.826.420
Dana Reksadipercayakan Tertahap	D.2.1.2.1.2	(1.992.330.032.200)	(4.813.478.526.886)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		17.560.866.888.103	13.497.984.299.532
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	280.412.334.935.034	239.872.791.752.439
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.4	(945.649.215.159)	(766.196.912.027)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		279.466.685.719.875	239.112.594.840.412
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2	297.456.952.607.978	252.610.579.139.934
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2.1	3.093.225.298.186.938	2.909.866.558.921.828
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.2	6.053.034.500	8.059.055.146
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	686.539.843.221.699	597.102.851.922.346
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.779.773.194.413.137	3.506.980.368.999.320
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>4.077.236.147.821.115</b>	<b>3.750.596.948.839.254</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>D.2.1.3</b>		
Tanah	D.2.1.3.1	4.428.281.859.414.984	4.417.293.824.458.955
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	933.675.927.241.240	860.536.886.280.874
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	474.213.237.504.935	448.605.823.943.973
Jalan, Jembatan, dan Jembatan	D.2.1.3.4	1.138.237.638.193.193	1.077.469.779.948.814
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	54.932.081.548.750	58.291.354.789.790
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	245.569.189.414.353	560.222.860.059.018
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(1.319.486.078.936.377)	(1.186.265.525.726.671)
Aset Konsumsi Jasa		1.088.210.735.514.398	951.059.329.073.009
Akumulasi Penyusutan Aset Konsumsi Jasa		(80.340.569.263.966)	(77.322.310.734.866)
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		8.364.120.669.248.853	7.373.473.978.962.413
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.8	(1.399.826.648.205.343)	(1.243.587.836.463.566)
<b>Jumlah Aset Tetap (Bersih)</b>		<b>6.964.294.021.043.510</b>	<b>6.129.886.142.498.847</b>

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
<b>Properti Investasi</b>	<b>D.2.1.4</b>		
Properti Investasi	D.2.1.4.1	160.506.675.838.552	93.074.388.721.774
<b>Jumlah Properti Investasi (Bruto)</b>		<b>160.506.675.838.552</b>	<b>93.074.388.721.774</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</b>	<b>D.2.1.4.2</b>		
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (Bersih)</b>		<b>194.733.750.662.586</b>	<b>38.811.976.556.711</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>	<b>D.2.1.5</b>		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.5.1	78.839.430.596	80.042.118.815
Piutang Tagihan Turunan Perbendaharaan/Turunan Garansi Rugi (TPYGR)	D.2.1.5.2	310.437.056.539	271.288.710.975
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.3	48.644.267.827.749	52.572.302.791.853
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.4	4.576.224.167.407	4.785.472.283.878
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)</b>		<b>53.609.768.282.371</b>	<b>58.109.103.905.621</b>
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	D.2.1.5.5	(4.421.514.439.573)	(4.537.490.610.399)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)</b>		<b>49.188.253.842.798</b>	<b>53.571.613.295.222</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>D.2.1.6</b>		
Kambisan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.6.1	49.875.449.159.365	61.264.824.345.326
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.2	71.168.490.828.320	61.339.638.287.500
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.2.1.6.3	1.241.448.831.883	1.273.242.636.973
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.4	451.183.897.363.302	324.530.703.435.536
Dana Penjaminan	D.2.1.6.5	12.829.602.955.000	12.449.624.944.000
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.6.6	52.063.867.817.609	30.138.707.426.198
Aset Lain-lain	D.2.1.6.7	696.199.803.151.065	667.808.773.446.210
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.6.8	29.854.766.285.823	29.625.443.493.878
<b>Jumlah Aset Lainnya (Bruto)</b>		<b>1.364.417.385.162.997</b>	<b>1.197.831.957.896.041</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.6.9	(343.679.425.565.565)	(318.133.969.089.488)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.6.10	(38.011.353.406.142)	(31.515.242.545.159)
<b>Jumlah Aset Lainnya (Bersih)</b>		<b>982.726.656.191.290</b>	<b>848.162.746.161.394</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>13.072.819.967.849.194</b>	<b>12.325.456.869.572.968</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>D.2.2</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>D.2.2.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	191.808.032.711.121	131.806.404.311.825
Utang Bunga	D.2.2.1.3	112.693.785.312.937	97.401.735.689.433
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	25.207.352.917.324	15.233.102.271.564
Utang Transfer	D.2.2.1.5	52.187.965.129.846	49.842.043.112.377
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	638.953.070.948.496	525.070.831.354.819
Unamortized Discount		(368.630.075.000)	(414.105.480.000)
Unamortized Premium		446.330.180.000	795.587.878.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	314.120.000.000.000	49.028.000.000.000
Unamortized Discount		(467.505.585.000)	(548.373.999.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	27.965.899.727.133	10.332.306.519.164
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	7.476.388.964.347	5.953.646.386.590
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	403.617.716.901	4.056.180.026
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	4.061.192.664	228.030.249.064
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.092.254.611.706.819</b>	<b>892.289.644.366.744</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>D.2.2.2</b>		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	31.552.061.212.395	18.141.468.578.073
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	6.583.241.522.870.168	6.381.787.234.099.873
Unamortized Discount		(46.942.941.191.000)	(52.963.964.105.000)
Unamortized Premium		44.567.904.657.000	43.768.938.800.000
Pembayaran Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	39.891.869.021.700	0
Utang Kepada Dana Pinjaman dan THT	D.2.2.2.1.4	25.871.215.355.337	34.446.771.532.148
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	313.375.462.067.170	280.419.670.447.589
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	560.625.887.734	25.727.640.452.793
<b>Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri</b>		<b>6.969.116.619.680.504</b>	<b>6.701.337.747.865.276</b>
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	886.277.290.731.920	822.838.479.742.048
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	26.579.390.708	26.646.297.359
<b>Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri</b>		<b>886.303.679.122.628</b>	<b>822.865.126.839.467</b>

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Kewajiban Konsepsi Jasa	D.2.2.3		
Kewajiban Konsepsi Jasa	D.2.2.3.1	589.002.419.926.666	504.065.294.802.522
<b>Jumlah Kewajiban Konsepsi Jasa</b>		<b>589.002.419.926.666</b>	<b>504.065.294.802.522</b>
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>8.444.424.909.729.798</b>	<b>8.828.266.168.797.265</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>9.536.679.521.496.617</b>	<b>8.920.557.813.873.949</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>D.2.3</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>13.072.819.967.849.194</b>	<b>12.325.456.869.572.968</b>

Jakarta, 21 Mei 2024  
a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
Menteri Keuangan



Disandatangani secara elektronik  
Sri Mulyani Indrawati



## D. Laporan Operasional

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	JUMLAH	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>E.2.1</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>E.2.1.1</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	<b>E.2.1.1.1</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	1.056.264.876.071.451	991.488.696.172.421	64.776.179.899.030	6,53
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	749.872.917.946.326	694.776.882.555.958	55.096.035.390.368	7,93
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	35.111.968.220.488	23.761.243.871.403	11.350.724.349.085	47,77
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	218.828.516.227.555	226.661.405.402.388	(7.832.889.174.833)	(3,46)
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	9.962.359.820.249	6.779.467.430.496	3.182.892.389.753	46,95
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	50.951.896.485.742	51.215.480.999.153	(263.584.513.411)	(0,51)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	13.814.253.622.480	39.784.089.995.800	(25.969.836.373.320)	(65,28)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		<b>2.134.806.788.394.291</b>	<b>2.034.467.266.427.619</b>	<b>100.339.521.966.672</b>	<b>4,93</b>
<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>E.2.1.1.2</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	280.285.831.628.760	302.124.663.573.157	(21.838.831.944.397)	(7,23)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	4.529.734	819.575	3.710.159	452,69
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	543.920.213.490.935	472.528.075.582.817	71.392.137.908.118	15,11
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	97.370.883.293.667	86.672.151.673.733	10.698.731.619.934	12,34
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		<b>921.576.932.943.096</b>	<b>861.324.891.649.282</b>	<b>60.252.041.293.814</b>	<b>7,00</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>E.2.1.1.3</b>				
Pendapatan Hibah		26.849.886.477.341	17.861.905.684.250	8.987.980.793.091	50,32
Jumlah Pendapatan Hibah		<b>26.849.886.477.341</b>	<b>17.861.905.684.250</b>	<b>8.987.980.793.091</b>	<b>50,32</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>3.083.233.607.814.728</b>	<b>2.913.654.063.761.151</b>	<b>169.579.544.053.577</b>	<b>5,82</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>E.2.1.2</b>				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	430.426.321.089.044	437.358.559.450.073	(6.932.238.361.029)	(1,59)
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	44.418.157.818.790	45.630.752.459.661	(1.212.594.640.871)	(2,66)
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	225.621.287.655.753	213.785.019.546.865	11.836.268.108.888	5,54
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	36.518.876.440.164	38.042.529.811.315	(1.523.653.371.151)	(4,01)
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	49.900.388.208.994	39.376.367.717.653	10.524.020.491.341	26,73
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	58.308.588.088.465	66.751.421.939.778	(8.442.833.851.313)	(12,65)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	JUMLAH	%
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	489.648.053.202.050	409.393.545.381.079	80.254.507.820.971	19,60
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	242.021.207.563.568	244.383.233.896.683	(2.362.026.333.115)	(0,97)
Beban Hibah	E.2.1.2.9	219.140.718.777	5.803.272.496.643	(5.584.131.777.866)	(96,22)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	156.341.091.530.982	163.486.863.969.805	(7.145.772.438.823)	(4,37)
Beban Transfer	E.2.1.2.11	881.390.373.057.804	819.069.477.047.347	62.320.896.010.457	7,61
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.12	209.244.320.645.414	219.860.952.898.605	(10.616.632.253.191)	(4,83)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.13	1.928.970.209.539	37.081.212.202.077	(35.152.241.992.538)	(94,80)
Beban Lain-lain	E.2.1.2.14	285.685.389.969.788	410.181.311.446.044	(124.495.921.476.256)	(30,35)
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>3.111.672.166.199.132</b>	<b>3.150.204.520.263.628</b>	<b>(38.532.354.064.496)</b>	<b>(1,22)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(28.438.558.384.404)</b>	<b>(236.550.456.502.477)</b>	<b>208.111.898.118.073</b>	<b>(87,98)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>E.2.2</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET</b>	<b>E.2.2.1</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset	E.2.2.1.1	548.935.351.301	679.664.460.287	(130.729.108.986)	(19,23)
Beban Pelepasan Aset	E.2.2.1.2	17.859.492.754.620	126.453.024.838.790	(108.593.532.084.170)	(85,88)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset		<b>(17.310.557.403.319)</b>	<b>(125.773.360.378.503)</b>	<b>108.462.802.975.184</b>	<b>(86,24)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>E.2.2.2</b>				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	105.211.500.000		105.211.500.000	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	536.653.910.900	1.337.452.801.614	(800.798.890.714)	(59,87)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		<b>(431.442.410.900)</b>	<b>(1.337.452.801.614)</b>	<b>906.010.390.714</b>	<b>(67,74)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>E.2.2.3</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	112.360.987.542.646	96.002.565.101.242	16.358.422.441.404	17,04
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	34.554.263.534.160	212.613.734.435.340	(178.059.470.901.180)	(83,75)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		<b>77.806.724.008.486</b>	<b>(116.611.169.334.098)</b>	<b>194.417.893.342.584</b>	<b>(166,72)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>60.064.724.194.267</b>	<b>(243.721.982.514.215)</b>	<b>303.786.706.708.482</b>	<b>(124,64)</b>

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	JUMLAH	%
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		31.626.165.809.863	(480.272.439.016.692)	511.898.604.826.555	(106,59)

Jakarta, 21 Mei 2024  
a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Sri Mulyani Indrawati

## E. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN ARUS KAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>F.2.1</b>		
<b>I. Arus Kas Masuk</b>	<b>F.2.1.1</b>		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	1.061.234.020.630.596	998.213.803.714.799
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.1.1.2	763.632.668.212.526	667.609.450.256.247
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	33.270.661.547.958	23.264.663.527.700
d. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.4	221.851.144.542.725	226.880.753.312.323
e. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.5	9.729.790.060.612	7.695.100.141.265
f. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.6	64.489.934.464.413	90.897.665.517.741
Total Penerimaan Perpajakan		<b>2.154.208.219.467.630</b>	<b>2.034.552.436.470.075</b>
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	254.203.031.073.614	268.770.890.270.784
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	82.058.743.373.870	40.597.091.946.149
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	179.868.171.315.795	195.739.979.810.678
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	95.890.302.158.963	89.902.312.175.594
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak		<b>611.990.337.922.242</b>	<b>595.016.280.263.205</b>
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	17.184.158.879.725	5.695.055.413.792
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		<b>2.783.382.716.269.797</b>	<b>2.635.258.772.087.072</b>
<b>II. Arus Kas Keluar</b>	<b>F.2.1.2</b>		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	412.711.324.466.564	402.441.656.300.334
2. Belanja Barang	F.2.1.2.2	432.714.969.865.127	426.149.061.519.090
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	439.882.584.341.259	386.341.819.780.815
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	269.592.066.053.747	252.812.907.867.326
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	219.140.718.777	5.803.272.496.643
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	156.601.833.832.214	161.523.078.405.090
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	225.023.669.152.725	404.385.774.531.710
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	63.845.907.625.000	62.998.688.562.915
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	135.944.555.602.100	100.823.947.472.776
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	5.876.010.795.530	4.591.474.242.743
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	398.029.628.594.542	378.000.000.000.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	50.334.741.347.305	54.783.954.054.112
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Kelautan dan Perikanan, Dana Insentif Fisik	F.2.1.2.13	26.520.021.192.724	28.749.936.344.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	128.081.946.376.309	118.380.687.000.719
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	69.656.768.617.317	67.906.138.390.431
16. Hibah Kepada Daerah	F.2.1.2.16	2.940.874.059.627	-
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		<b>2.818.175.952.638.867</b>	<b>2.855.692.416.978.604</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		<b>(34.793.236.369.070)</b>	<b>(220.433.644.891.532)</b>
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>F.2.2</b>		
<b>I. Arus Kas Masuk</b>	<b>F.2.2.1</b>		
1. Pengalokasian dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	546.960.660.401	584.273.977.400
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	1.097.737.606.166	667.176.265.512
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	359.653.415.387	22.000.000.000
4. Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	26.441.256.275.225	27.059.703.613.522
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		<b>28.445.607.957.179</b>	<b>28.333.153.856.434</b>

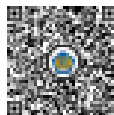
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**LAPORAN ARUS KAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>II. Arus Kas Keluar</b>	<b>F.2.2.2</b>		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	303.041.293.068.751	240.570.302.124.070
2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	2.225.200.000.000	-
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	41.421.985.992.266	60.694.867.718.409
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	53.382.030.644.000	54.272.006.500.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		<b>420.078.509.708.017</b>	<b>375.507.176.342.479</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		<b>(391.634.901.747.838)</b>	<b>(347.174.022.486.045)</b>
<b>C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>F.2.3</b>		
<b>I. Arus Kas Masuk</b>	<b>F.2.3.1</b>		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	902.837.385.270.107	1.107.581.763.373.185
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	162.650.352.796.218	106.283.083.586.601
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	6.374.398.495.969	3.952.157.097.370
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	148.514.851.485	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		<b>1.072.016.651.415.779</b>	<b>1.219.817.804.957.156</b>
<b>II. Arus Kas Keluar</b>	<b>F.2.3.2</b>		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	542.880.028.458.620	440.563.575.597.568
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	81.450.306.790.493	79.291.905.245.457
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	F.2.3.2.3	1.905.999.112.657	1.805.388.794.603
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		<b>626.216.334.361.770</b>	<b>521.650.869.627.628</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		<b>445.794.317.054.009</b>	<b>698.166.134.429.528</b>
<b>D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>F.2.4</b>		
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	620.329.866.094	151.170.449.070
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	14.112.089.380.009	(3.468.162.038.412)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	74.033.583.845.555	23.360.027.823.794
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	(4.129.878.872)	(649.111.176)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		<b>88.761.873.212.786</b>	<b>20.042.387.123.266</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN</b>		<b>108.138.952.149.887</b>	<b>150.609.854.175.217</b>
Penggunaan SAL		(35.000.000.000.000)	-
Koreksi Pembukuan		(3.596.936.515.293)	11.569.840.825.433
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN</b>	<b>F.1.2</b>	<b>69.571.115.634.604</b>	<b>162.178.704.000.650</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>	<b>F.1.1</b>	<b>536.443.156.881.227</b>	<b>374.272.482.880.577</b>
<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>606.014.272.515.831</b>	<b>536.443.156.881.227</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran		197.710.858.794	215.927.152.362
Kas di Bendahara Penerimaan		318.602.129.457	28.613.891.119
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Diakikan		7.604.425.582.862	2.436.441.198.794
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(35.230.294.868.007)	(26.341.869.598.933)
Kas BLU yang Belum Diakikan/Lainnya		(38.643.493.231)	(4.503.505.984)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(148.155.907.831.841)	(52.253.149.048.677)
Kas Transito (Kirim Uang)		4.930.665.723	799.340.452
<b>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>F.1.3</b>	<b>430.715.695.755.788</b>	<b>460.525.416.110.388</b>

Jakarta, 21 Mei 2024  
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
 Sri Mulyani Indrawati

## F. Laporan Perubahan Ekuitas

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>G.1</b>	<b>3.404.893.056.498.959</b>	<b>3.916.345.179.380.431</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	<b>G.2</b>	<b>31.626.165.809.863</b>	<b>(480.272.439.016.692)</b>
<b>KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>G.3</b>		
Penyesuaian SiLPA	G.3.1	1.498.554.940.209	9.431.660.376.686
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.2	5.454.942.591.117	3.732.184.012.634
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.3	56.981.718.247.281	(60.953.016.315.937)
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.4	2.146.315.181.897	916.566.907.783
Koreksi Lainnya	G.3.5	33.539.693.083.251	15.588.603.391.310
<b>JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>		<b>99.621.224.043.755</b>	<b>(31.284.001.627.524)</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>G.4</b>	<b>-</b>	<b>104.317.762.744</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>G.5</b>	<b>131.247.389.853.618</b>	<b>(511.452.122.881.472)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>G.6</b>	<b>3.536.140.446.352.577</b>	<b>3.404.893.056.498.959</b>

Jakarta, 21 Mei 2024  
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
 Sri Mulyani Indrawati

Sumber :

[https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/LKPP/LKPP\\_Tahun\\_2023\\_audited\\_plus\\_opini.pdf](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/LKPP/LKPP_Tahun_2023_audited_plus_opini.pdf)